



Dari Kota Tradisional Menjadi Kota Kolonial: Dinamika Perkembangan Kota Singkawang pada Awal Abad XX

Andang Firmansyah^{1*}, Edwin Mirzachaerulsyah,¹ M. Rikaz Prabowo¹

¹Universitas Tanjungpura, Indonesia

* andang.firmansyah@fkip.untan.ac.id

Dikirim: 10-11-2024; Direvisi: 23-06-2025; Diterima: 28-06-2025; Diterbitkan: 31-08-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perkembangan Kota Singkawang pada abad 20. Perkembangan tersebut ditandai dengan berkembangnya berbagai infrastruktur perkotaan yang mendukung roda perekonomian dan mobilitas penduduk yang menyebabkan perubahan dari kota tradisional menjadi kolonial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber tulisan seperti buku, artikel jurnal, dan berbagai macam penelitian yang pernah dilakukan dan bersinggungan dengan Kota Singkawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya perkembangan kota Singkawang dari era tradisional menjadi kota kolonial ditandai ketika Belanda mulai membangun infrastruktur, administrasi pemerintahan dan mengelola kebijakan di dalamnya. Berkembangnya Misionaris Katolik pada masa ini juga ikut membawa perubahan bagi Kota Singkawang terutama dibidang pendidikan dan kesehatan mereka ikut membangun berbagai sarana prasarana seperti gereja Katolik, sekolah dan rumah sakit. Perubahan dari kota tradisional ke kolonial tidak menghilangkan identitas masyarakat Singkawang yang multikultur karena perubahan yang terjadi hanya pada infrastruktur dan administrasi pemerintahan.

Kata Kunci: abad XX; sejarah kota; Singkawang, perkembangan kota

Abstract: This study aims to examine the dynamics of Singkawang City's development in the 20th century. This development was marked by the growth of various urban infrastructures that supported the economy and population mobility, causing the city to transform from a traditional city into a colonial city. This study employs a qualitative method using literature review, drawing on written sources such as books, journal articles, and various studies previously conducted that are related to Singkawang City. The findings of this study indicate that the transformation of Singkawang City from a traditional city to a colonial city was marked by the Dutch beginning to build infrastructure, establish administrative governance, and implement policies within the city. The growth of Catholic missionaries during this period also brought changes to Singkawang City, particularly in the fields of education and health, as they helped build various facilities such as Catholic churches, schools, and hospitals. The transition from a traditional city to a colonial one did not erase the multicultural identity of Singkawang's society, as the changes occurred primarily in infrastructure and government administration.

Keywords: 20th century; city history; Singkawang; urban development



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Peradaban adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan telah berkembangnya kehidupan sosial, agama, ekonomi, dan teknologi suatu kelompok masyarakat. Kehidupan sosial dalam sebuah peradaban umumnya sudah terorganisir. Pembagian kelas sosial, adanya aturan hukum hingga adanya lembaga pemerintahan adalah perkembangan dalam kehidupan sosial (Supardan, 2009). Arti dari kata peradaban dapat disamakan dengan kata kota, mengingat kehidupan diperkotaan sudah mengalami kemajuan diberbagai bidang kehidupan.

Tulisan mengenai dinamika sebuah peradaban atau kota sangat penting untuk dibuat. Pemahaman terhadap identitas, pembelajaran kesalahan masa lalu, pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempertahankan warisan dan nilai budaya adalah alasan perlu dicatatnya sebuah dinamika suatu peradaban (Kuntowijoyo, 2013). Setiap peradaban disepanjang waktu pasti akan ditulis, tulisan tersebut akan menjadi sejarah. Hal ini sudah menunjukkan bahwa menulis tentang sejarah suatu peradaban atau kota adalah hal yang penting (Kuntowijoyo dalam Firmansyah, 2021).

Berbicara mengenai peradaban, beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Barat diduga sudah menjadi peradaban atau kota sejak berkembangnya kerajaan bercorak Hindu-Budha di Nusantara. Berbagai penelitian yang membahas suatu kota di Kalimantan Barat dari berbagai masa atau perodesasi sejarah sudah banyak dibuat. Namun, bila berbicara mengenai kota masa kini di Kalimantan Barat, hanya Kota Pontianak yang akan muncul dibenak masyarakat. Padahal Provinsi Kalimantan Barat memiliki dua wilayah yang sudah berstatus sebagai kota selain Pontianak, yaitu Kota Singkawang. Daerah ini mendapat status sebagai kotamadya sejak tahun 2001 berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang, n.d.).

Singkawang awalnya merupakan sebuah pedesaan kecil yang berkembang disekitar kawasan Teluk Mak Jantu. Setelah masuknya penambang emas yang terdiri dari orang-orang Hakka dari Ghuangdong Tiongkok pada pertengahan abad 18 kawasan ini kemudian berkembang menjadi kota kecil atau kota tradisional. Mereka datang ke Singkawang untuk bekerja sebagai penambang emas di Montrado (Triono, 2018). Keberadaan etnis Tionghoa sebagai etnis yang mendominasi perekonomian Kota Singkawang menyebabkan Singkawang mendapat berbagai julukan, diantaranya adalah Bumi Bertuah Gayung Bersambut, Kota Cina Nusantara, Kota Amoi, Kota Seribu Kelenteng, bahkan ada yang menyebutnya sebagai Hongkong van Borneo. Sultan dari Kesultanan Sambas berperan dalam kedatangan etnis Tionghoa di Singkawang. Pada pertengahan abad ke-18, Singkawang adalah bagian dari Kesultanan Sambas, dikenal sebagai pintu masuk pedalaman Kalimantan Barat yang mengandung emas (daerah Montrado). Sultan Sambas mendatangkan penambang emas dari Tiongkok untuk mendukung kegiatan pertambangan.

Pada tahun 1760 hingga 1854, Singkawang adalah *entreport* atau pelabuhan perdagangan yang dilakukan oleh kongsi dagang besar di Montrado (Suprpta et al., 2019). Meskipun bagian dari Kesultanan Sambas, Singkawang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kesultanan Sambas. Singkawang hanya tempat untuk pedagang, tukang, dan buruh Tionghoa bermukim sehingga kota ini hanya menjadi kota tradisional saja karena modernisasi diberbagai bidang belum terbentuk. Kesultanan Sambas mulai memperhatikan Singkawang ketika Pemerintah Hindia Belanda menempatkan pejabatnya di Singkawang. Selain Pontianak, Singkawang menjadi salah satu daerah di Kalimantan Barat yang paling diperhatikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (Rahmayani, 2010).

Pontianak menjadi batasan spasial (lokasi) favorit para peneliti apabila ingin membuat kajian mengenai Kolonialisme Belanda di Kalimantan Barat. Mengingat status Pontianak sebagai ibukota dari *Westerafdeeling van Borneo*. Penelitian yang berfokus pada kolonialisme

Belanda di Singkawang belum banyak dibuat oleh para peneliti. Penelitian mengenai Singkawang kebanyakan terfokus pada keberagaman budaya dan terfokus pada etnis Tionghoa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani (2010) yang membahas tentang Permukiman etnis Tionghoa di Singkawang pada abad ke-19. Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani (2011) yang membahas tentang hal yang sama, yaitu Permukiman etnis Tionghoa di Singkawang dan sekitarnya dari masa kongsi hingga masa kolonial pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Terdapat juga penelitian yang fokus kajiannya terletak pada peninggalan dari masa atau periode Kolonial Belanda di Kota Singkawang. Penelitian itu milik Triono (2018), Yogi (2012), dan Muna et al., (2021). Adapun penyajian dua dari tiga penelitian ini juga membahas peninggalan dari masyarakat Tionghoa juga. Tidak hanya terfokus pada peninggalan Kolonial Belanda.

Sudah seharusnya penelitian mengenai pengaruh Kolonialisme Belanda di Singkawang juga dibuat. Mengingat diantara abad ke-19 hingga abad ke-20, pengaruh kolonialisme Belanda cukup signifikan terhadap Kota Singkawang, bahkan pengaruh dari kolonialisme hingga kini masih dapat dilihat. Pengaruh Kolonialisme Belanda paling dominan di bidang pemerintahan. Pengaruh di bidang pemerintahan turut serta mempengaruhi beberapa bidang kehidupan lainnya di Kota Singkawang, salah satunya adalah bidang agama dan bidang kesehatan. Beberapa bangunan peninggalan Kolonialisme Belanda di bidang pemerintahan, agama, dan kesehatan masih berdiri hingga saat ini, bahkan diantaranya masih digunakan. Berdasarkan penelitian milik Triono (2018) Kota Singkawang memiliki lebih dari 10 bangunan peninggalan Kolonial Belanda.

Tentunya, penelitian mengenai pengaruh kolonialisme Belanda di Singkawang dapat menjadi pengantar bagi para pembaca sebelum mengetahui peninggalan dari periode kolonial apa saja yang ada di Singkawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perkembangan Kota Singkawang pada awal abad ke-20 dengan menyoroti bagaimana pemerintah kolonial Belanda mulai membangun struktur pemerintahan kota serta mengatur kebijakan untuk mengelola kawasan yang dihuni oleh berbagai entitas etnis serta membangun berbagai infrastruktur pendukung. Tujuan lain yang ingin dikaji dalam artikel ini diantaranya adalah dampak dari perkembangan kota tradisional hingga kolonial yang masih bertahan hingga saat ini di Kota Singkawang. Penelitian ini dapat menjadikan referensi tambahan bagi masyarakat umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Adlini et al., (2022) mengatakan jika penelitian kualitatif studi pustaka adalah upaya pengumpulan data dengan merekonstruksi teori atau keterangan yang sudah tercantum di dalam buku, jurnal, dan riset-riset dalam bentuk lainnya yang sudah ada. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan pendekatan sejarah atau *historical research*. Menurut Kuntowijoyo (2013) *historical research* memiliki 5 tahapan. Pertama menentukan topik penelitian, kedekatan intelektual menjadi alasan peneliti mengambil topik penelitian Pengaruh Kolonialisme Belanda Pada Bidang Pemerintahan di Kota Singkawang Kalimantan Barat. Kedua adalah tahap pengumpulan sumber. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber sekunder merupakan hasil penelitian yang sudah ada dalam bentuk buku dan artikel jurnal. Tahap ketiga adalah kritik sumber. Kritik sumber peneliti lakukan dengan melihat latar belakang penulis buku atau artikel jurnal yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini dan membandingkan keterangan dari beberapa sumber. Tahap keempat adalah penafsiran, peneliti menggunakan jenis penafsiran sintesis atau menggabungkan keterangan atau informasi dari

beberapa sumber yang sudah melalui tahap kritik sumber. Tahap terakhir adalah tahap penulisan sejarah, yang mana pada tahap ini aspek kronologis peneliti utamakan.

Hasil Penelitian

Dinamika Struktur Pemerintahan di Kota Singkawang Hingga Awal Abad XX

Pada tahun 1818, Pemerintah Kolonial Belanda tiba kembali di Kalimantan Barat. Orang Tionghoa dirasa perlu tunduk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Setelah menancapkan kekuasaan politik di Kesultanan Sambas, Belanda dengan kekuatan militernya langsung menuju Montrado untuk menundukkan kekuatan Kongsi Cina dan memberikan kontrol atas wilayah Montrado dan sekitarnya (Rahmayani, 2015). Kekuatan orang Tionghoa sangat kuat ketika mereka membentuk sebuah kongsi yang ditopang oleh kekuatan perniagaan dari aktivitas ekonomi yang dijalan di sepanjang pesisir barat Kalimantan Barat kala itu. Singkawang merupakan kota perniagaan yang berkembang karena adanya pertambangan emas di Montrado (Montrado) karena Singkawang menjadi kawasan yang memasok segala kebutuhan para penambang mulai dari alat-alat pertanian, bahan makanan hingga candu.

Pada tahun 1834, George Windsor Earl menggambarkan jika Singkawang adalah sebuah kota dengan pertokoan yang membentang sepanjang jalan. Singkawang didominasi etnis Tionghoa. Pertokoan di Singkawang membantu memenuhi kebutuhan kongsi besar yang berpusat di Montrado (Rahmayani, 2011). Melihat strategisnya posisi Singkawang pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai menempatkan kekuatan militernya serta pejabat kontrolir yang akan mengatur serta mengawasi aktivitas orang-orang Tionghoa pada khususnya dan masyarakat bumiputera lainnya. Kehadiran Belanda di Singkawang menyebabkan beberapa kali perubahan status atau struktur administratif pada Kota Singkawang.

Terhitung sejak tahun 1839 kegiatan administratif Singkawang berada di bawah Pemerintah Kolonial Belanda. Singkawang menjadi salah satu bagian dari *Afdeeling* Sambas hingga tahun 1848. *Afdeeling* adalah sebutan pada masa Kolonial Belanda untuk daerah setingkat kabupaten pada saat ini. Meskipun tetap bagian dari Sambas, segala hal yang ada di Singkawang sudah menjadi urusan Pemerintah Kolonial Belanda, bukan lagi menjadi urusan pemerintah Kesultanan Sambas. Pada tahun 1848 atau selama paruh kedua abad ke-19, Singkawang menjadi bagian dari *Afdeeling* Montrado (Suprpta et al., 2019).

Meskipun sudah berada di bawah naungan Pemerintah Kolonial Belanda dan menjadi ibu kota dari *Afdeeling* Montrado, Singkawang tetap menjadi kota satelit penyedia kebutuhan pokok. Pada tahun 1854 Singkawang digambarkan sebagai satu kampung besar dengan jalan panjang. Terdapat rumah berbahan dasar kayu namun rendah – mungkin panggungnya tidak setinggi rumah orang Dayak. Bagian depan rumah warga digunakan sebagai toko. Barang yang mereka jual adalah kebutuhan pangan seperti beras, daging, dan sayur. Mereka juga menyediakan alat-alat seperti alat penghisap opium atau madat (Veth, 1854).

Afdeeling Montrado awalnya beribukota di Montrado. Namun, tahun 1880 ibukota *Afdeeling* Montrado dipindahkan ke Singkawang (Suprpta et al., 2019). Singkawang tetap menjadi jalur perdagangan internasional dengan wilayah Singapura, karet dan kelapa adalah komoditas utama. Awal abad ke-20 kembali terjadi perubahan struktur di daerah Singkawang. Singkawang tidak lagi menjadi bagian *Afdeeling* Montrado, namun kembali lagi menjadi bagian dari *Afdeeling* Sambas. Pada masa ini, Singkawang berstatus sebagai *onderafdeeling* – saat ini daerah setingkat kecamatan. *Onderafdeeling* Singkawang dipimpin oleh seorang *Controluer* (Fitrianti et al., 2023).

Pada tahun 1915 wilayah *Afdeeling* Sambas berubah menjadi *Afdeeling* Singkawang, dipimpin oleh Asisten Residen. *Onderafdeeling* Singkawang menjadi ibukota dari *Afdeeling* Singkawang. Selain *Onderafdeeling* Singkawang, terdapat juga 4 *onderafdeeling* di *Afdeeling*

Singkawang, yaitu Onderafdeeling Pemangkat, Onderafdeeling Sambas, dan Onderafdeeling Mempawah (Rahmayani, 2011). Perubahan administratif ini menuntut semakin ditambahnya infrastruktur penunjang. Perlu diketahui, infrastruktur seperti gedung perkantoran, rumah pejabat, hingga tangsi militer perlu ditambah agar kegiatan administratif dapat berjalan dengan maksimal. Untuk mengatasi tantang akibat perubahan status administratif tersebut, pemerintah Kolonial Belanda di Singkawang menerapkan beberapa kebijakan yang menysasar orang Eropa dan Tionghoa.

Kebijakan Publik Pada Masa Kolonial Belanda di Singkawang

Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat. Singkawang sebagai kota dagang sudah tentu memerlukan infrastruktur yang memadai agar aktivitas dagang bisa berjalan dengan maksimal sehingga memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dikuasainya Singkawang oleh Pemerintah Kolonial juga berdampak pada pembangunan infrastruktur. Kebijakan publik pemerintah Kolonial Belanda di Singkawang pada umumnya bermuara ke arah pembangunan infrastuktur dan tata administrasi. Infrastruktur dari Pemerintah Hindia Belanda pada umumnya adalah jalan raya dan bangunan yang hingga saat ini masih dimanfaatkan.

Kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda umumnya menysasar orang Eropa sendiri dan orang Tionghoa. Orang Tionghoa dianggap sebagai aset yang memberi keuntungan ekonomi, sehingga harus dihormati dan dilindungi haknya. Namun, orang Tionghoa tetap dicurigai karena mereka dulunya orang kongsi yang memberontak. Pada tahun 1854, terjadi perang antara pasukan kolonial dengan kongsi-kongsi dagang. Singkawang diambil alih oleh pegawai *gubernemen*. Perang berakhir tahun 1855, Pemerintah Kolonial Belanda menganggap perang tersebut adalah upaya pemberontakan. Pajak sebesar 3 gulden diterapkan kepada laki-laki agar mereka mendapat kartu identitas, sebagai tanda bukan pemberontak (Heidhues dalam Rahmayani, 2015). Sistem kerja paksa bagi laki-laki diterapkan sekali dalam seminggu. Pembangunan jalan raya dari Singkawang menuju Montrado adalah bentuk kerja paksa yang Pemerintah Kolonial Belanda terapkan.

Sejak tahun 1853 hingga akhir abad ke-19, Singkawang menjadi destinasi bagi orang-orang Tionghoa yang melarikan diri dari pedalaman. Orang Tionghoa yang awalnya penambang beralih profesi menjadi petani. Sudut-sudut Singkawang dipenuhi oleh lahan pertanian (Aprilia et al., 2023). Pemerintah Kolonial Belanda tidak tinggal diam melihat fenomena urbanisasi tersebut. Beberapa kebijakan penataan kota dilaksanakan. Pemerintah Kolonial Belanda di Singkawang juga menerapkan kebijakan *wijkenstelsel* atau pengelompokan Permukiman etnis Tionghoa. Permukiman Tionghoa biasanya di perkampungan Tionghoa atau pasar.

Orang Tionghoa di Singkawang memiliki *Kapthai* – seorang yang bertugas sebagai wali orang-orang Tionghoa jika ingin berurusan dengan pemerintah. *Kapthai* bertanggungjawab langsung kepada Asisten Residen (Rahmayani, 2015). *Kapthai* adalah orang Tionghoa yang paling dihormati di wilayah tersebut. Sistem kongsi secara resmi runtuh pada paruh kedua abad ke-19. Perselisihan hingga perang menjadi alasannya (Rahmayani, 2013). Antara tahun 1873 – 1880, terdapat kantor pos di Singkawang. Pada tahun 1907, sudah ada pos militer di Singkawang, menjadikan Singkawang salah satu dari 3 wilayah di Kalimantan Barat yang memiliki pos militer.

Penataan Kota Singkawang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sejak berakhirnya perang kongsi hingga tahun 1914. Tata letak Permukiman etnis Tionghoa diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Belanda menerapkan kebijakan *wijkenstelsel*. Sungai Singkawang – sungai di depan rumah Marga Tjhia adalah

pembatas anantara pecinan dan kantor Pemerintah Kolonial Belanda. Sisi selatan sungai menjadi pecinan atau Permukiman orang Tionghoa sedangkan sisi utara – yang saat ini ada di kawasan Taman Burung adalah lokasi Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan kantor-kantor pemerintahannya. Kampung Sekip adalah Permukiman kolonial yang tumbuh ketika Singkawang menjadi ibukota afdeeling. Pemilihan lokasi kantor Pemerintah Kolonial yang berseberangan dengan pecinan bertujuan agar orang Tionghoa dapat diawasi.

Pada bidang Ekonomi, Pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya memberi izin kepada orang Tionghoa untuk berdagang. Perusahaan milik orang Eropa juga tercatat pernah berdiri di Singkawang. Diantaranya adalah *Borneo Sumatra Handel Maatschappij (Borsumij), Societa, Geo Wehry & Co.* Bahkan pada tahun 1901, perusahaan *Borsumij* pernah mendirikan kantornya di pusat Kota Singkawang. Pada tahun 1925, kantor bea cukai dan pajak mulai didirikan di Singkawang. Padatnya lalu lintas perdagangan di Singkawang adalah pemantik Pemerintah Kolonial Belanda untuk mendirikan kantor pajak.

Kebakaran pernah terjadi pada tahun 1927 dan 1928 yang menghancurkan pasar, rumah, dan sekolah. Pada tahun 1931 dan 1937, kembali terjadi kebakaran yang kurugiannya lebih besar. Kebakaran ini menghancurkan tiga ratus rumah, seratus toko, beberapa hotel, *toapekong*, dan masjid. Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan tiga blok pasar setelah kebakaran 1937, yaitu Pasar Tengah (Jalan Sejahtera), Pasar Atap (Jalan Niaga), dan Pasar Baru (Jalan Diponegoro). Pemerintah Kolonial mendorong penggunaan konstruksi batu untuk menggantikan konstruksi kayu yang mudah terbakar. Program khusus diberikan kepada toko-toko Tionghoa yang terbakar. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kolonial Belanda dan *Volkscredietbank*. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon penerima kredit.

Infrastruktur berupa jalan raya di Singkawang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pembangunan jalan bertujuan menunjang pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1913 jaringan jalan di Singkawang semakin diperluas karena Singkawang adalah pelabuhan yang sedang berkembang. Pembangunan Jalan Raya yang menghubungkan Singkawang, Sambas, dan Bengkayang baru dibangun setelah operasi *pasifikasi* tahun 1916. Pembangunan jalan dipesisir dilaksanakan pada tahun 1917. Pemerintah Kolonial Belanda sangat memperhatikan perkembangan Singkawang sebagai kota dagang. Tahun 1931 total jarak tempuh jalan raya di Onderafdeeling Singkawang adalah 169,5 km (Rahmayani, 2011). Rumah pejabat Kolonial Belanda dan gedung-gedung administratif di Singkawang juga dibangun disepanjang jalan raya. Layaknya pejabat masa kini, pejabat Kolonial Belanda harus mendapat fasilitas dari negara. Contohnya adalah fasilitas penyedia air bersih dan juga listrik sehingga pada tahun 1920-an terdapat penampungan air bersih dan juga pembangkit listrik. Bangunan pemerintahan pada masa Kolonial Belanda sebagian besar dibangun sejak tahun 1920-an, yang berdiri hingga saat ini (Triono, 2018).

Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda mengenai kehidupan beragama cukup unik. Kerajaan Belanda adalah kerajaan Protestan, kerajaan Protestan dan Kerajaan Katolik di Eropa seling bertikai. Namun, Pemerintah Hindia Belanda memberi izin kepada para misionaris untuk mengembangkan agama Katolik di Kalimantan Barat. Kedatangan Misi Katolik baru berhasil diterima baik di Borneo pada akhir abad ke-19. Meskipun sejatinya mereka telah menapaki wilayah Borneo sejak abad ke-17. Pemerintah Belanda yang sebagian besar merupakan Protestan merasa keberatan dengan kedatangan misi. Hal ini merupakan satu dari beberapa kendala bagi para misi untuk berhasil berkarya di Borneo (Rahmayani, 2013). Pada 11 Februari 1905 secara resmi Sri Paus menyerahkan daerah Borneo – Belanda sebagai daerah Misi kepada Ordo Kapusin Provinsi Belanda. Aktivitas Misi di Kalimantan secara resmi bergerak pada abad ke-20 ditandai dengan berdirinya Prefektur Apostolik Borneo

dengan pusatnya di Pontianak. Di daerah-daerah karya misi pembangunan kebanyakan bermula dari status Prefektur Apostolik dan secara bertahap meningkat menjadi Vikariat Apostolik.

Berdasarkan buku Borneo Almanak 1911-1955, (2016) pada tahun 1874 saat kunjungan Pastor de Vries SY, Telah ada sebanyak 51 orang Katolik di Singkawang. Meski demikian, tidak diketahui secara pasti dimana mereka dibaptis (kemungkinan di Singkawang, di Bangka, ataupun di Malaka). Di Singkawang sendiri, sebenarnya telah mendapatkan izin oleh Gubernur Jenderal van Rees untuk mendirikan sebuah stasi misi sejak tahun 1880. Namun, selalu ditunda. Hingga di tahun 1885 Singkawang menjadi stasi misi yang tetap dengan Pater W.J. Staal SY sebagai Pastor pertamanya dan menjadi stasi pertama serta basis karya misi di daerah pantai. Sedangkan di Pedalaman, Sejiram menjadi stasi pangkal.

Pada 30 November 1905 tibalah rombongan pertama pastor dan bruder kapusin di Singkawang yang terdiri dari Pater Prefek, Pater Pacifius Bos, Pater Eugenius, Bruder Wilhelmus, dan Bruder Theodoricus. Mereka ditemani oleh Pater Schröder. Mereka berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai Kalimantan melalui pemerintah kolonial dan imam-imam jesuit yang berkarya di Hindia Belanda. Dengan adanya kedatangan Misionaris, pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan mulai diperhatikan. Tidak mengherankan apabila peninggalan kolonialisme Belanda di Singkawang tidak hanya dari bidang pemerintahan. Namun, ada juga peninggalan Kolonialisme Belanda di bidang keagamaan dan kesehatan.

Peninggalan Kolonial Belanda di Singkawang

Berbicara mengenai sebuah kota di Masa Kolonialisme Belanda kurang lengkap apabila tidak membahas peninggalan dari masa tersebut. Sebagai salah satu dari dua kota yang paling diperhatikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Kalimantan Barat, terdapat banyak sekali peninggalan dari Masa Kolonialisme Belanda di Singkawang. Adapun pada Masa Kolonial Belanda, peninggalan tersebut dimanfaatkan sebagai penunjang aktivitas pemerintah dan misionaris (agama). Peninggalan tersebut saat ini berstatus sebagai *heritage* atau warisan budaya. Firmansyah & Mirzachaerulsyah (2023) bahwa ini sudah cukup membuktikan bahwa bangsa asing yang dianggap sebagai penjajah juga berperan dalam pembentukan kebudayaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia umumnya masih tetap menggunakan bangunan kolonial untuk menunjang aktivitasnya.

Tjandrasmita (2009) mengatakan, untuk menentukan dari periode atau masa apa suatu peninggalan dapat dilihat dari siapa yang memanfaatkan, mendukung, dan menerimanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Triono (2018), di Singkawang terdapat bangunan yang pada masa lalu dimanfaatkan oleh orang-orang Belanda. Sehingga dapat dikategorikan sebagai peninggalan dari masa Kolonial Belanda. Peninggalan tersebut berupa gedung perkantoran, rumah pejabat Kolonial Belanda, bangunan serta struktur yang dimanfaatkan oleh BUMN (penyedia listrik dan air bersih), dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh para misionaris. Semua gedung ini berada di Wilayah Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat. Bila dilihat melalui udara, jarak antar bangunan dapat dikatakan berdekatan atau satu kompleks (Muna et al., 2021). Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa peninggalan periode Kolonial Belanda yang masih terjaga keasliannya.

Table 1. Bangunan dari Masa Kolonial Belanda di Bidang Pemerintahan

No	Peninggalan	Deskripsi
1	Bangunan <i>Residentielle Afdeling</i>	Berdasarkan informasi yang diperoleh bangunan ini dikenal sebagai Mess Daerah Kota Singkawang. Berlokasi samping Taman Burung Singkawang tepatnya di Jalan Merdeka, Kelurahan

2 Gedung Vektor Afdeeling	<p>Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Bangunan ini memiliki luas 171,6 m², berdiri di lahan seluas 6.138 m². Objek ini berdiri sejak tahun 1920, difungsikan sebagai tempat tinggal <i>Controlleur</i> Belanda pada masa Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa kemerdekaan, beberapa kepala daerah Kabupaten Sambas pernah menggunakannya sebagai tempat tinggal. Bangunan berdenah persegi berstruktur rumah panggung ini berbahan dasar kayu ulin dengan betuk atap perpaduan bentuk pelana dan perisai. Bagian atap sudah mengalami renovasi, saat ini menggunakan baja ringan atau seng. Dibangun bersamaan dengan bangunan <i>Residentielle Afdeeling</i> pada tahun 1920. Bangunan <i>Residentielle Afdeeling</i> dan Vektor Afdeeling berhadapan, hanya dipisahkan dengan jalan raya. Pada saat Singkawang berstatus sebagai Afdeeling, bangunan ini difungsikan sebagai kantor <i>Controlleur</i>. Adapun bangunan ini adalah tempat untuk mengurus kegiatan tata pemerintahan. Pada masa kemerdekaan, bangunan ini pernah difungsikan sebagai Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang. Untuk saat ini, bangunan ini sudah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bangunan ini dapat dikatakan sebagai salah satu bangunan bercitra <i>Indis</i>. Kayu menjadi bahan utama bangunan, dibebberapa bagian bangunan menggunakan kayu ulin, seperti dibagian lantai. Denah bangunan berbentuk persegi panjang dengan enam ruangan, tiga di sebelah kanan dan tiga di sebelah kiri. Sehingga membentuk seperti lorong, di ujung lorong terdapat satu ruangan besar semacam aula. Atap bangunan berbentuk pelana dan arsitektur tumpang.</p>
3 Gedung Landraad	<p>Pada masa Kolonial Belanda, Landraad adalah peradilan tingkat pertama bagi orang Timur Asing dan orang Tionghoa. Dibangun pada tahun 1920, bangunan ini langsung difungsikan sebagai tempat untuk menangani perkara perdata dan perkara pidana di Afdeeling Singkawang. Dalam kompleks bangunan ini terdapat juga ruang tahanan. Bahan bangunan berdenah Letter U ini didominasi oleh kayu dengan bentuk atap perpaduan tipe pelana dan perisai. Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari catatan mengenai bangunan ini ketika berfungsi sebagai lembaga peradilan tidak banyak. Peristiwa Mandor 1944 menjadi penyebab hilangnya catatan dan informasi penting mengenai aktivitas yang ada di bangunan ini. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat, bangunan ini adalah tempat untuk membuat orang dipenjara. Terdapat dua bangunan tambahan yang bangun pada tahun 80-an di dalam kompleks bangunan Landraad. Bangunan tambahan ini tidak mengubah bangunan aslinya. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup adalah instansi terakhir yang menggunakan bangunan ini. Saat ini, bangunan utama tidak digunakan lagi. Bagian belakang digunakan untuk pelatihan olahraga karate.</p>
4 Pos Pengamanan Pejabat Belanda	<p>Tidak banyak informasi mengenai bangunan ini. Pos Pengamanan Pejabat Belanda diperkirakan berdiri pada tahun 1920-an, tidak lama setelah bangunan <i>Residentielle Afdeeling</i>. Keamanan para pejabat Pemerintah Kolonial Belanda menjadi alasan utama bangunan ini berdiri tepat di sebelah selatan bangunan <i>Residentielle Afdeeling</i>. Pada masa Kemerdekaan, fungsi</p>

bangunan ini tidak jauh berbeda dengan fungsi bangunan saat masa Kolonial Belanda. Fungsi bangunan saat ini adalah Pos Polisi Militer.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang; 2023; Triono, 2018

Tabel 2. Bangunan dari Masa Kolonial Belanda yang Dibangun Oleh Misionaris

No	Peninggalan	Deskripsi
1	Gereja Santo Fransiskus Asisi	Gereja Santo Fransiskus Asisi dibangun antara tahun 1926 hingga 1928. Pembangunan gereja berawal dari kedatangan ordo Kapusin di Kalimantan. Singkawang menjadi stasi pertama di Pulau Borneo kekuasaan Belanda. Pada tahun 1905, Pater Prefek Pacifickus bersama tiga pastor dan dua bruder datang ke Singkawang. Mereka melihat sudah ada bangunan gereja berukuran kecil dan rumah pastor yang sederhana. Seiring dengan perkembangan umat Katolik di Singkawang, gereja kecil tersebut direnovasi hingga wujudnya seperti yang saat ini. Bangunan gereja berdenah salib. Bagian tengah bangunan difungsikan sebagai ruang ibadah. Atap bangunan berbentuk pelana tumpang dua. Terdapat juga atap berbentuk menara pada gereja ini. Di sekitar gereja ini terdapat beberapa bangunan dari periode Kolonial Belanda lainnya yang masih saling berhubungan.
2	Gedung Susteran SFIC	SFIC dapat diibaratkan seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah bagi masyarakat Katolik. SFIC adalah kepanjangan dari <i>Sororum Franciscallum ab Immaculata, Conception A Beata Matre Dei</i> atau dalam bahasa Indonesia artinya Suster Fransiskus dari Perkandungank Tak Bernoda Bunda Suci Allah. Suster dari Konggresi SFIC pertama kali menginjakkan kaki di Singkawang tahun 1906. Pembangunan gedung Susteran dimulai sejak tahun 1909 hingga 1910. Bentuk bangunan pada awalnya masih sederhana jika mengukur bentuk bangunan di masa kini. Wujud bangunan yang terlihat pada masa kini mulai dirancang sejak tahun 1930-an dan selesai tahun 1937. Sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini, fungsi bangunan tidak pernah berubah yaitu sebagai asrama bagi para suster Kongregasi SFIC.
3	Komplek Alverno	Komplek Alverno sebenarnya adalah Rumah Sakit yang diperuntukan bagi penderita penyakit kusta di Kalimantan Barat. Para Suster dari Kongregasi SFIC sejak tahun 1917 berkomitmen merawat penderita kusta di Kalimantan Barat. Komplek Alverno diremikan pada 17 November 1925. Saat ini kompleks Alverno dikelola oleh Keuskupan Agung Pontianak. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat membantu operasional Alverno dengan menyediakan tenaga medis dan pembiayaan. Terdapat 7 massa bangunan di dalam kompleks Alverno. Adapun bangunannya terdiri atas satu asrama suster atau biarawati, satu gereja, satu kantor, dan empat bangsal untuk pasien kusta.

Sumber: Triono, 2018

Tabel 3. Peninggalan dari Masa Kolonial Belanda untuk Menunjang Kebutuhan Pejabat Kolonial Belanda

No	Peninggalan	Deskripsi
1	Water Toren	<i>Water Toren</i> adalah struktur menara dengan tong air di atasnya (menara air), terletak di atas bukit yang masyarakat sebut sebagai Mungguk Periuk. Pada masa Kolonial Belanda, <i>Water Toren</i> berfungsi untuk menyuplai air bersih Permukiman pejabat dan orang-orang asing yang bermukim di Jalan Merdeka. Air bersih pada masa Kolonial Belanda diambil dari Gunung Poteng, sebuah gunung yang terletak di sebelah timur Kota Singkawang. Water Toreng di Singkawang berdiri sejak tahun 1927. Tingga menara air ini sekitar 40 meter. Terdapat juga informasi bahwa ketinggian menara air ini kurang lebih hanya 20 meter. Menara air ini tidak hanya menyuplai kebutuhan air bersih pejabat, namun juga untuk menyuplai air bersih masyarakat.
2	Gedung Aniem	Sebuah kota tidak lengkap apabila tidak ada listrik. Pada masa Kolonial Belanda, listrik menjadi penunjang aktivitas di pemerintahan dan perdagangan. Aktivitas para pemilik modal lebih efisien ketika memanfaatkan listrik untuk berdagang. Adapun ANIEM adalah singkatan dari <i>Algemene Nederland Indie Elektrische Matschapij</i> . ANIEM sebutan bagi masyarakat Singkawang untuk menyebut perusahaan pembangkit listrik yang didirikan pada tahun 1927 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Lokasi gedung ANIEM tidak jauh dari Permukiman penduduk. Suara deru mesin pembangkit listrik mengganggu masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Sumber: Triono, 2018; Yogi, 2012

Masih terdapat banyak sekali bangunan dari periode Kolonial di Singkawang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan berarsitektur kolonial. Gubernur Jenderal Herman Willem Deandels adalah pelopor perkembangan arsitektur kolonial di Nusantara. Deandels memperkenalkan model arsitektur *The Empire Style* atau *The Dutch Colonial Villa* (Triono, 2018). Arsitektur yang diperkenalkan oleh Deandels semakin dikembangkan. Pada abad ke-20, berkembang sebuah arsitektur yang bercitra kolonial (Eropa) namun menggabungkan arsitektur lokal (daerah di Indonesia). Tujuannya adalah penyesuaian dengan lingkungan, iklim, dan material yang tersedia. Adapun gabungan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal dikenal sebagai arsitektur *Indis* (Soekiman, 2011). Arsitektur Indis di Kalimantan Barat umumnya dapat dilihat pada bangunan yang memiliki bentuk dan ornamen khas Eropa namun menggunakan konstruksi rumah panggung seperti rumah masyarakat etnis Melayu dan Dayak untuk menghindari banjir.

Kesimpulan

Perubahan kota Singkawang dari kota tradisional menjadi kolonial pada awal abad ke-20 membawa dampak besar bagi masyarakat serta arah perkembangan kota. Mobilitas masyarakat dari pedalaman dapat terhubung karena adanya pembangunan jalan raya dari pusat kota hingga ke beberapa daerah seperti Sedau, Pajintan, Roban hingga Sui Wie. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah misi dan sekolah pemerintah, rumah sakit, watertoren, kantor pemerintahan turut mendorong berkembangnya migrasi penduduk dari luar Singkawang mereka kemudian menghuni kawasan Kampung Melayu, Kampung Jawa dan kawasan lain disekitar pasar serta pelabuhan.

Jatuhnya Kongsi Cina pada 1914 akibat perang kongsi antara Belanda, Kesultanan Sambas dengan Kongsi Cina merubah lanskap politik di Kota Singkawang. Orang-orang Tionghoa yang tadinya bermata pencaharian sebagai penambang emas kemudian beralih menjadi petani dan peladang. Kawasan pertanian berkembang dipinggiran kota sehingga daerah yang dianggap sebagai hinterland berubah menjadi perkampungan-perkampungan petani Tionghoa seperti Sedau, Sagatani, Sungai Garam dan sebagainya. Kawasan tersebut juga terhubung oleh jalan tanah kerikil yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda.

Perubahan dari kota tradisional ke kolonial tidak merubah tatanan kebudayaan masyarakat setempat. Budaya Tionghoa, Melayu dan Dayak tetap berkembang sebagaimana sebelum Belanda berkuasa. Perubahan yang terjadi hanya pada aspek infrastruktur, kebijakan pada struktur pemerintahan serta peraturan administrasi kota. Masyarakat yang menghuni Kota Singkawang akan tercatat sebagai penduduk kota dan tercatat dalam data statistik Kota Singkawang. Kota kolonial Singkawang kemudian berakhir ketika Indonesia telah merdeka dan Kalimantan Barat bergabung dengan Republik Indonesia. Beberapa bangunan peninggalan kolonial Belanda tidak lagi dimanfaatkan sebagai fasilitas publik pemerintah seperti Gedung Landraad, Kantor Residensi Singkawang dan Gedung Borneo Sumatera Maatschappij.

Daftar Rujukan

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 973–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aprilia, U. E., Liya, & Harnum, S. D. (2023). Perang Kongsi di Kota Tambang Emas Kalimantan Barat Pada Abad Ke 19. *DAYA NASIONAL: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA*, 1(3), 120–129. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i3.72098>
- Firmansyah, A., & Mirzachaerulsyah, E. (2023). The Role of the Dutch East Indies Government in Building Pontianak City Center. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(2), 832–835. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3260>
- Firmansyah, H. (2021). Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Area Duizen Vierkanten Paal Kota Pontianak sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3554>
- Fitrianti, A., Aminuyati, & Putri, A. E. (2023). Persepsi Peserta Didik Kelas XI IPS Man Kota Singkawang Terhadap Situs Sejarah Pemerintah Kolonial Belanda di Singkawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 17–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8062125>.
- Gedung Landraad 2023*. (2023).
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Muna, J., Kalsum, E., & Putro, J. D. (2021). Identifikasi Elemen Arsitektur Pada Fasad Bangunan Heritage di Kawasan Pecinan Singkawang, Kalimantan Barat Studi Kasus: Bangunan Kolonial. *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur*, 9(2), 441–455. <https://doi.org/10.26418/jmars.v9i2.47625>.
- Rahmayani, A. (2010). *Permukiman Tionghoa di Singkawang Abad ke-19 (Sejarah Kota Bercirikan Tionghoa)*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.

- Rahmayani, A. (2011). *Permukiman Tionghoa Di Singkawang Dan Sekitarnya Dari Masa Kongsi Hingga Masa Kolonial (Abad Ke-19 Sampai Awal Abad Ke-20)*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak. <https://www.pustaka-bpnbkabar.org/pustaka/permukiman-tionghoa-di-singkawang-dan-sekitarnya-dari-masa-kongsi-hingga-masa-kolonial-abad>
- Rahmayani, A. (2013). *Pelayanan Kesehatan Di Singkawang Dan Pontianak Pada Awal Abad Ke-20*. BPNB Pontianak.
- Rahmayani, A. (2015). MONTRADO 1818-1858: Dinamika Kota Tambang Emas. *Patanjala*, 7(2), 345–360. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i2.105>.
- Residentielle Afdeeling Mess Daerah Kota Singkawang*. (2023).
- Soekiman, D. (2011). *Kebudayaan Indis Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi*. Komunitas Bambu.
- Supardan, D. (2009). *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Bumi Aksara.
- Suprpta, B., Subekti, A., & Alfahmi, M. N. (2019). *Dari Singkawang Merayakan Kebinekaan*. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan.
- Tjandrasasmita, U. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Triono, T. (2018). *Singkawang Heritage Sebuah Kajian Arkeologi dan Cagar Budaya*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang*. (n.d.).
- Veth, P. J. (1854). *Borneo Bagian Barat Geografis, Statistis, Historis Jilid 1*. Institut Dayakologi.
- Yeri, P. (2016). *Kutipan-Kutipan dan Foto-Foto dari Borneo Almanak 1911-1955*. Pohon Cahaya.
- Yogi, I. B. P. P. (2012). Pelestarian Kawasan Pecinan Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. *Naditira Widya*, 7(1), 59–69. <https://karya.brin.go.id/id/eprint/18000>.